



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 857/IV/2015

II/APRIL 2015



Kebersamaan DPR dan Wartawan



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

Kebersamaan DPR dan Wartawan



Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan sambutan di acara Press Gathering

Wartawan memiliki peranan dalam mempublikasikan kegiatan di lingkungan DPR. Banyak isu nasional dan penting yang perlu diberikan informasi secepatnya dari anggota dewan kepada wartawan, dan segera tersiar kepada masyarakat. Sehingga, kerjasama antara DPR dengan wartawan dirasa sangat penting.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPR Setya Novanto, saat memberikan sambutan dalam acara *Press Gathering* Wartawan Koordinatoriat DPR RI, bertajuk Sinergi DPR Mewujudkan Parlemen Modern, di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (27/03/15) malam. Malam itu, Novanto didampingi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono.

“Suatu kebahagiaan karena saya bisa bertemu bersama para wartawan. Saya akui, saya bisa menjadi Ketua DPR pun tak lepas dari peran wartawan dan media. Kami harapkan kerjasama penting ini dapat dilanjutkan,” harap

Novanto.

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi Golkar ini menyampaikan program dari DPR yang terdekat adalah ingin membenahi DPR, untuk menuju Parlemen Modern. Ada beberapa konsultasi pembenahan yang akan segera dilakukan.

“Pertama, kita ciptakan informasi yang benar-benar terbuka kepada masyarakat. Kedua, terkait dengan teknologi, yang akan kita lengkapi, seperti *website*, majalah, maupun TV Parlemen. Media itu akan kita ciptakan lebih baik lagi. Sehingga apa yang menjadi kepentingan rakyat, dapat diketahui secara cepat dan memberikan kontribusi terhadap media nasional,” jelas Novanto.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I ini menegaskan, masyarakat ingin tahu bagaimana rekam jejak DPR. Sehingga, dalam Parlemen Modern ini, setiap anggota akan mempunyai *website* pribadi, sehingga rekam jejaknya

dapat segera diketahui.

“Kita ciptakan komunikasi yang transparan dan seluas-luasnya. Jika di dapilnya ada masalah, masyarakat dapat mengaksesnya ke *website* masing-masing anggota Dewan. Sehingga komplain dapat disampaikan kepada anggota. Sekarang juga sedang kita siapkan semuanya,” imbuh Novanto.

Selain pengaduan yang berkaitan dengan kondisi di daerah, Novanto menambahkan, DPR juga sedang menyiapkan tempat pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yang direncanakan dalam waktu kurang dari satu bulan lagi dapat dioperasikan. Tempat pengaduan ini juga berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Menutup sambutan, Novanto berpesan kepada seluruh peserta, selama acara untuk menciptakan rasa kekeluargaan di antara DPR dan Wartawan. Termasuk sesama wartawan juga untuk menjaga kekompakan.

“Saya berharap, kekompakan tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Wartawan adalah sesuatu yang penting dan *urgent*. Sehingga persahabatan DPR dan wartawan untuk ditingkatkan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan terus. Kerjasama yang masih jadi kekurangan ini akan kita perbaiki,” harap Novanto.

Ditemui usai acara, Roem Kono menyatakan, kunci dari parlemen modern adalah sistem advokasi, sistem penyediaan informasi yang betul-betul bisa diakses dengan masyarakat luas, dan penyediaan sumber-sumber media informasi.

“Media sebagai penyambung lidah dari DPR, diberikan akses yang baik, sarana dan prasarana yang baik, untuk

mendukung teman-teman wartawan mengakses semua informasi di DPR ini. Itu akan kami usahakan mulai tahun ini,” janji Ketua BURT ini.

Politisi Golkar ini menambahkan, Parlemen Modern tercermin jika sarana dan prasarana, baik informasi dan komunikasi sudah memadai, kemudian akses informasi tidak terlalu sulit, Sumber Daya Manusia yang bagus dan punya intelektual yang tinggi.

“Maka diperlukan visi atau misi untuk menuju Parlemen Modern. Di bawah kepemimpinan Pak Setya Novanto ini, kita meletakkan dasar-dasar itu menjadi suatu lembaga parlemen dan lembaga yang berwibawa yang nantinya akan menuju kepada parlemen modern. Jadi, lembaga tinggi Negara kita ini ada sesuatu kewibawaan tersendiri dimata bangsa kita dan juga bangsa Negara lain,” harap Politisi asal Dapil Gorontalo ini.

Masih dalam kesempatan yang sama, mewakili Sekretaris Jenderal DPR, Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR Setyanta Nugraha mengatakan, kegiatan *press gathering* DPR dengan wartawan merupakan salah satu kegiatan rutin Kesetjenan DPR RI yang bertujuan agar tercipta saling interaksi antara DPR dengan wartawan, sehingga sinergitas antara kedua unsur dapat terwujud.

“Karena itu tema yang kita ambil yaitu sinergi DPR dan media mewujudkan

parlemen modern. Kami mengharapkan ini dapat menjadi wadah bersama dan penyelenggaraannya dapat lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Media Sebagai Ujung Tombak Informasi

Media memiliki peran sangat penting, dan merupakan ujung tombak dari informasi dan pemberitaan. Namun, sarana dan prasarana untuk awak media di lingkungan DPR masih kurang representatif. Oleh karena itu, BURT berupaya untuk memberikan perhatian, agar media dapat bekerja lebih baik.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso saat memberikan sambutan di acara *Press Gathering* Wartawan Koordinator DPR RI, Sabtu (28/03/15).

“Kami sudah mengamati fasilitas untuk wartawan, kita ingin wartawan bisa bekerja dengan baik di lingkungan parlemen. Kami lihat, *press room* tidak manusiawi. Untuk itu, kami ingin ‘nguwongke’ (memanusiakan) para wartawan. Kita ingin tingkatkan lagi, misal internetnya, ruangan, dan lain-lain,” janji Agung.

Politisi Demokrat ini menambahkan, keinginan dari Pimpinan DPR untuk menuju Parlemen Modern, perlu didukung oleh pers dan berita, sehingga kinerja DPR akan terpublikasikan.

“DPR juga memerlukan untuk diberitakan. Kalau tidak, masyarakat tidak tahu bagaimana kinerja DPR. Kami ingin kegiatan anggota dewan tersampaikan dengan baik, bukan hanya berita buruk saja, tapi berita yang berimbang. Kami ingin wartawan mendukung program DPR,” harap politisi asal Dapil Jawa Barat I ini.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko berharap, acara *press gathering* ini dapat meningkatkan kerjasama DPR dengan wartawan. Ia menyatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas kepada awak media yang bertugas di lingkungan Kompleks Parlemen.

“Kami dari Sekretariat Jenderal akan berusaha semaksimal mungkin melakukan komunikasi dengan teman-teman sekalian memfasilitasi, dan memberikan kemudahan supaya kerja-kerja jurnalistik selama di DPR itu semakin mudah, dan semakin cepat. Apalagi kalau kita mempunyai impian bersama mewujudkan Parlemen Modern,” tutur Djaka.

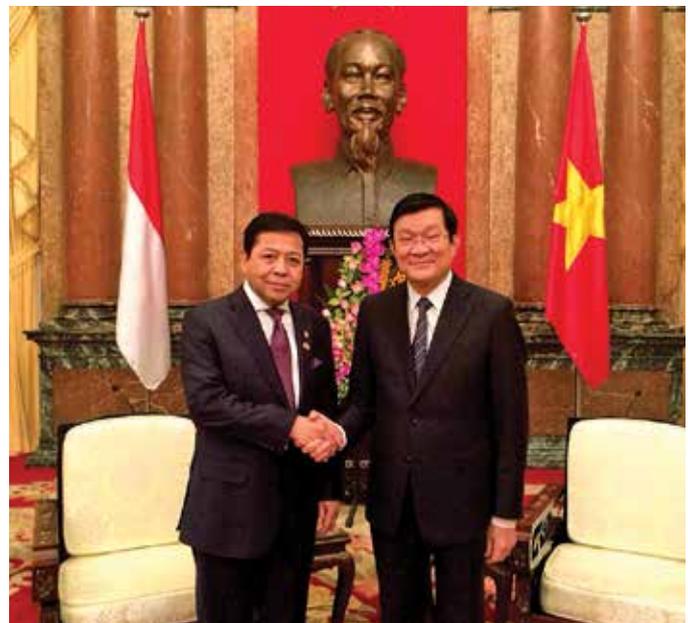
Press Gathering yang diikuti oleh setidaknya 150 Wartawan Koordinator DPR RI ini dapat dikatakan berjalan lancar dan meriah. Sebagai bumbu acara, disediakan berbagai *doorprize* dan *tracking* ke air terjun Ciisimun. (si,sf) foto: naefurodji/parle/hr

Ketua DPR Bahas Isu Strategis dengan Vietnam

Berbagai isu strategis dengan Vietnam dibahas antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Ketua Majelis Nasional dan Presiden Republik Sosialis Vietnam. Sabtu (28/3) Novanto bertolak ke Hanoi dengan membawa misi penting, memperkuat hubungan bilateral.

Banyak agenda penting di Hanoi yang dihadiri Novanto. Di antaranya ada pertemuan Sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-132. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, ia menemui Nguyen Sinh Hung Ketua Majelis Nasional Vietnam, Senin (30/3). Usai pertemuan tersebut, Novanto juga menemui Truong Tan Sang Presiden Republik Sosialis Vietnam.

Dalam pertemuan dengan Presiden Vietnam dibahas isu-isu strategis kedua negara, yaitu peningkatan hubungan



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Truong Tan Sang Presiden Republik Sosialis Vietnam

bilateral, peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Vietnam, dan persiapan pembentukan Komunitas ASEAN. Isu lain yang dibicarakan Novanto adalah soal potensi ekonomi Indonesia dan kerja sama maritim. Seperti telah disampaikan Presiden Joko Widodo, kini Indonesia sedang menggagas terbentunya poros maritim dunia.

Tak ketinggalan momentum pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan undangan kepada parlemen dan pemerintah Vietnam pada pertemuan *Parliamentary Event* di

Jakarta 23 April mendatang. Undangan tersebut terkait dengan peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA). Momentum KAA sangat penting untuk merefleksi kembali kerja sama di masa lalu dan menumbuhkan semangat untuk menyelesaikan masalah masa kini.

Penyelesaian masalah yang perlu segera diselesaikan adalah membuka jalur logistik dan pelabuhan yang dapat menghubungkan perdagangan kedua negara. Ini terkait dengan kerja sama maritim. Dan kedua negara menyatakan sepakat melakukan kerja

sama kemaritiman. Tidak hanya jalur logistik, keselamatan pelayaran dan keterpaduan ekonomis pelabuhan di kedua negara juga dibahas.

Kedua negara juga perlu menyelesaikan batas lautnya, terutama batas zona ekonomi eksklusif yang sudah hampir sepuluh tahun berlalu. Perundingan soal ini segera dilanjutkan. Pemerintah berencana mengutus Menteri Luar Negeri Retno Lestari ke Vietnam untuk menuntaskan pembicaraan isu-isu strategis tersebut. (mh)/foto:doc/parle/iw.

DPR Dorong Jerman Tingkatkan Investasi di Indonesia

Indonesia dan Jerman sepakat meningkatkan volume perdagangan dari USD 7,3 miliar pada 2014 menjadi USD 12 miliar pada 2015. Target peningkatan volume perdagangan tersebut disambut baik oleh DPR.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert di DPR, Selasa (31/3). Target kerja sama perdagangan tersebut tentu menguntungkan kedua negara. Novanto mengungkapkan, nilai investasi Jerman di Indonesia pada 2013 tercatat sebesar USD 53,3 juta untuk 105 proyek.

“Melihat potensi pembangunan Indonesia yang besar, DPR mengharapkan Jerman dapat meningkatkan investasinya di Indonesia,” harap Novanto dalam pertemuan tersebut. DPR, lanjut Novanto, juga menyambut baik kerja sama pembangunan kedua negara. Samapai saat ini, Jerman masih menjadi mitra penting Indonesia dalam kerja sama pembangunan, terutama di bidang energi, ekonomi, dan politik.

“DPR menyambut baik kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman yang kini difokuskan pada bidang energi dan perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, serta peningkatan good governance.” Pimpinan DPR sendiri, kata Novanto, mengapresiasi langkah Pemerintah Jerman untuk meningkatkan sekaligus memperkuat kerja sama bilateral dalam kemitraan komprehensif.

Sebelumnya sudah ada dokumen Deklarasi Jakarta pada 2012 yang



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert

memuat komitmen bersama Indonesia-Jerman untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Deklarasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara kongkrit. Bidang kerja sama bilateral itu menyangkut pembangunan infrastruktur, perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, dan energi.

“Kami harapkan forum Indonesia Germany Advisory Group (IGAG) dapat segera memberikan masukan kongkrit bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara,” ujar Novanto lagi. Sementara di bidang kerja sama parlemen, Jerman dan Indonesia diharapkan sudah membentuk grup kerja sama parlemen sebagai bentuk penguatan kemitraan kedua negara. Bahkan, parlemen ASEAN telah membentuk kerja sama antarpallemen melalui ASEAN *Interparliamentary Friendship Groups*.

Apalagi komunitas ASEAN pada akhir 2015 ini segera memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Momentum ini perlu dimanfaatkan Jerman untuk membangun peluang kerja sama Jerman dengan komunitas ASEAN atau Uni Eropa dengan ASEAN. “Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN, maka Jerman dapat memanfaatkan Indonesia sebagai pintu gerbang bagi Jerman untuk mengakses pasar Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Pasifik,” papar Novanto.

Hadir dalam pertemuan tersebut dua Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Agus Hermanto. Selain itu, ada Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia. (mh) foto:denus/parle/hr



Perlu Soft Diplomasi Untuk Hadang Radikalisme



Suasana pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert

Isu radikalisme dan terorisme dengan membawa sentimen agama perlu direspon dengan bijak. Respon yang berlebihan justru akan menyuburkan aksi teror itu sendiri. Indonesia walau mayoritas penduduknya pemeluk Islam, tetap menolak aksi terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pertemuannya dengan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert

menyerukan, agar dunia merespon isu radikalisme tersebut dengan *soft diplomacy*. Pernyataan Novanto tersebut menanggapi aksi teror kaum militan ISIS yang menghantui kawasan Timur Tengah.

“Perlu ada solusi komprehensif untuk mengatasi kelompok-kelompok paham radikal, yakni dengan mencari dan mengetahui serta menyelesaikan akar atau sumber permasalahannya. Kerja sama internasional perlu dilakukan un-

tuk menghentikan gerakan ISIS,” seru Novanto di hadapan Norbert Lammert, Selasa (31/3).

Menurut Novanto, Indonesia dan Jerman perlu merespon dengan pendekatan *soft diplomacy* tersebut, agar radikalisme tidak meluas. Apalagi, Indonesia dan Jerman juga pernah menyelenggarakan *interfaith dialogue* beberapa waktu yang lalu. Semangat dialog tersebut perlu diaktifkan kembali.

Novanto menegaskan, paham yang dikembangkan ISIS bertentangan dengan ajaran Islam. Indonesia sendiri, sambung Novanto, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, menolak terang-terangan keberadaan ISIS.

Dalam pertemuan tersebut, Novanto didampingi dua Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon. Hadir pula mendampingi Ketua DPR, Nurhayati Assegaf Ketua BKSAP, Hanafi Rais Wakil Ketua Komisi I, Achmad Hafisz Tohir Ketua Komisi VI, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Johann Georg Michael Wirchel. (mh) foto: [denus/parle/hr](#)

Jerman Puji Kemajuan Demokrasi Indonesia

Jerman ternyata mengamati betul perkembangan politik di Tanah Air. Dalam periode yang relatif singkat, Indonesia dinilai mengalami kemajuan pesat di bidang politik, terutama proses berdemokrasinya dibanding puluhan tahun lalu.

Setidaknya inilah penilaian dari Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert, saat bertemu dengan Pimpinan DPR RI, Selasa (31/3). Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai mendampingi Ketua DPR Setya Novanto menerima kunjungan Lammert tersebut, mengungkapkan, Jerman membutuhkan puluhan tahun untuk membangun demokrasi seperti yang ada sekarang. Sementara Indonesia sejak reformasi 1998, sudah mengalami peningkatan yang luar

biasa.

“Lammert menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini sudah sangat maju. Ketika dia terakhir datang ke Indonesia sekitar 20 tahun lalu, kondisinya sangat jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang, termasuk juga pembangunan yang sedang terjadi di Jakarta. Iya berharap kita bisa saling belajar,” kata Fadli.

DPR, lanjut Fadli, bahkan ingin menginisiasi pembentukan forum parlemen dunia untuk demokrasi. Inisiatif itu rencananya akan direalisasikan pada akhir tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, Ketua Komisi VI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Achmad Hafisz Tohir, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Johann Georg Michael Wirchel. (mh) foto: [iwan armianas/parle/hr](#)

Konsultasi DPR-Presiden Digelar Senin

Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon, di ruang kerja Lantai III Gedung Nusantara III, Rabu (1/4) menerima kunjungan Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno dan Mendagri Tjahyo Kumolo. Kedatangannya dalam rangka membahas konsultasi Presiden dengan DPR yang dijadwalkan Senin (6/4) mendatang.

Menko Polhukam menjelaskan, dalam konsultasi nanti akan dibahas soal Perppu pencalonan Kapolri dan Perppu Plt Pimpinan KPK serta APBN-Perubahan berkaitan anggaran pilkada serentak Desember 2015.

“Saya tidak menjelaskan materinya, sebab akan dijelaskan langsung oleh Presiden. Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Presiden dan dalam konsultasi nanti akan didampingi menteri terkait,” katanya.

Saat ditanyakan mengapa pertemuan konsultasi tidak dilakukan hari ini, Menteri Tedjo mengatakan Presiden ada kegiatan dalam rangka persiapan peringatan Ulang Tahun ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA). Karena itu Presiden mengutus dirinya dan Mendagri untuk membicarakan pertemuan konsultasi yang direncanakan



Pimpinan DPR RI dengan Menkopolkam dan Mendagri

akan dilakukan di Gedung DPR.

Mendagri Tjahyo Kumolo menambahkan, dalam pembahasan APBN-P 2015, Wakil Ketua DPR menjelaskan kembali mengenai postur RAPBN 2016, dalam kaitan pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun 2015. Secara prinsip, kata dia, daerah-daerah siap, sedangkan bagi daerah yang belum siap akan ada payung hukum sehingga

diberi kesempatan untuk menganggarkannya.

Menurutnya, menyongsong Pilkada serentak tersebut, Komisi II DPR telah membentuk Tim Pengawas sementara KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang. (mp,ayu) foto: denus/parle/hr

Pimpinan DPR Terima Perwakilan Mantan Karyawan PT Antam



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Ketua Komisi IX Dede Yusuf menerima perwakilan Eks Karyawan PT Aneka Tambang Tbk

Wakil ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Agus Hermanto menerima perwakilan Eks Karyawan PT Aneka Tambang Tbk Pulau Gebe, Halmahera Maluku Utara di ruang rapat Pimpinan DPR, Senayan Jakarta Rabu (1/4).

“Kami menerima aduan bahwa sebanyak 319 karyawan PT Antam distrik Pulau Gebe, Halmahera Maluku Utara pada 2005 diberhentikan dengan suatu alasan, salah satunya produksinya menurun. Dan 319 mantan karyawan ini baru mendapat penggajiannya selama 32 bulan. Padahal mereka sudah lama sekali bekerja. Kami bukan eksekutif yang dapat langsung bergerak.



Namun kami akan diskusikan kasus ini dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian terutama Dirjen PHI (Penyelesaian Hubungan Industrial),” papar Agus.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf yang ikut mendampingi Pimpinan DPR menemui perwakilan eks karyawan PT Antam, Tbk ini mengaku sebagaimana yang diketahuinya, PT Antam Tbk memang sempat merugi hingga lebih dari 700 Miliar. Hal itu konon disebabkan

pengelolaan perusahaan yang kurang baik hingga menyebabkan harga saham perusahaan tersebut turun. Kemungkinan karena merugi itulah hingga kemudian membuat manajemen PT Antam melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran di beberapa wilayah termasuk Pulau Gebe, Halmahera, Maluku Utara.

“Menindaklanjuti audiensi ini, Komisi IX akan segera menggelar rapat gabungan dengan Komisi VI yang

menaungi BUMN dan bidang Perindustrian untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi antara pihak BUMN dengan karyawan ataupun eks karyawan sebagaimana yang dialami oleh eks karyawan PT Antam ini. Kebetulan belum lama ini beberapa BUMN juga telah menerima tambahan modal dari Negara. Hal ini tentu dapat mempengaruhi hubungan kerja antara BUMN dan para karyawannya,” ujar Dede Yusuf. (Ayu, foto: andri/parle/hr).

Pemerintah Siap Diskusikan RUU KKR



Menkopolkam dan Mendagri saat diwawancara wartawan

Pemerintah siap mendiskusikan Rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) yang sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Menurut Menkopolkam Tedjo Edy Purdijatno usai mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPR Rabu (1/4) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pihaknya siap

mengadakan pertemuan dengan Ketua Komnas yang baru.

“Malah pihak Komnas HAM yang menginginkan pertemuan dengan pemerintah. Intinya pemerintah menyanggupi dan akan dicari waktu yang tepat untuk mendiskusikan RUU tersebut,” ungkap Tedjo.

Yang terpenting, lanjut dia, kita

akan menyelesaikan semuanya dengan baik. “Kita lihat nanti dalam diskusi, kalau hanya dari saya, nanti bisa salah,” ujarnya.

Ditanya apakah dalam diskusi nanti akan melibatkan korban-korban, Menko menyatakan nanti akan diketahui apa yang diminta Komnas HAM. Diakui pula bahwa pertemuan formal dengan Komnas HAM selama ini belum pernah dilakukan. Sebagai Pimpinan Komnas HAM yang baru ujar Menko Polhukam, mengaku ada PR yang belum diselesaikan.

Dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015 sudah diketok DPR. Terdapat 37 RUU yang diprioritaskan untuk disahkan menjadi UU pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, terdapat satu RUU yang kembali diusulkan oleh pemerintah setelah sebelumnya dipangkas Mahkamah Konstitusi (MK). RUU tersebut adalah RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Terkait dengan Pilkada serentak, pemerintah sudah menyatakan kesiapannya. TNI dan Polri siap melakukan pengamanan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015. (mp) foto: denus/parle/hr

Kebijakan Pemerintah Soal Gula Tidak Konsisten

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan Kebijakan Daulat Gula Nasional yang berpihak pada petani. Presiden Jokowi pernah berjanji akan menyetop impor gula apabila merugikan petani tetapi Kementerian Perdagangan malah mengeluarkan izin impor pada 1 April 2015.

“Ini pemerintah seperti lain bicara lain tindakan, tidak mewakili rasa sakit petani tebu. Karena itu jangan salahkan kalau dipublik muncul kesan pemerintah ini tidak sungguh-

sungguh berpihak pada petani,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (30/3/14).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini mengingatkan janji Jokowi akan menghentikan impor gula kepada petani tebu di Padepokan Arum Sabil, Desa Tanggul Kulon Kecamatan, Jember, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Saat itu presiden menekankan kalau memang merugikan petani, dan gula dalam negeri cukup maka impor gula disetop.



Pimpinan Komisi VI DPR saat memberikan Keterangan Pers

Sementara Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor gula mentah (*raw sugar*) untuk industri sebanyak 945.643 ton. Izin tersebut berlaku mulai 1 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 atau hanya untuk kuartal kedua.

“Saya menyayangkan kebijakan Kemendag yang menerbitkan izin impor gula yang mulai berlaku per 1 April 2015. Kebijakan tersebut sungguh menyakiti perasaan petani kita yang terus terpuruk karena harga gula yang terus merosot di pasaran karena kebijakan impor,” tegas dia.

la menekankan minimnya koordinasi antara Kemendag, Kementan, Kemenperin sehingga dengan mudahnya pemerintah menyerah dan *ujug-ujug* melakukan impor gula yang nyata-nyata merugikan petani. Saat ini dengan HPP gula yang masih tinggi sekitar Rp8.500 dan mulai memasuki musim giling, sudah pasti petani akan sangat dirugikan karena gula impor bisa dijual lebih rendah.

Seharusnya ada kebijakan yang nyata atas pembatasan impor gula mentah untuk industri makanan, minuman dan farmasi yang memerlukan gula dengan tingkat kemurnian tinggi (icumsa 45) agar tidak merembes ke pasar-pasar tradisional dan merusak harga gula di pasaran.

Politisi FP Gerindra ini menilai pemerintah belum cukup berupaya mewujudkan solusi yang pernah diajukan petani dan beberapa asosiasi gula diantaranya, benahi dan tingkatkan randemen gula dari 7 menjadi 10% sehingga HPP bisa ditekan, merevitalisasi pabrik gula yang berumur tua (dari 62 pabrik yg ada, 40 di antaranya sudah berumur di atas 100 tahun) dan melakukan perluasan areal tanam tebu yang saat ini hanya sekitar 470 ribu hektar dan dinilai belum ideal untuk menopang program swasembada gula. (iky) foto: naefurodji/parle/hr

KKLH Diminta Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Menghadapi musim kemarau mendatang, Komisi IV DPR menginginkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KKLH) mempersiapkan rencana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Ketua Komisi IV Edhi Prabowo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun lalu sudah menjadi bencana tahunan melanda beberapa wilayah di tanah air, hingga asap mengganggu kesehatan dan transportasi bahkan berdampak ke beberapa negara tetangga.

“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lapangan dalam siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Ketua Komisi IV Edhi Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Menteri KLH, membahas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 KKLH, Senin (30/3) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Anggota Komisi IV Dewi Coryati (F-PAN Dapil Bengkulu) menegaskan, harus dibuat program partisipasi dan



Suasana Raker Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KKLH)

pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, seperti facebook, tweeter dan lainnya.

“Melalui media sosial, masyarakat bisa berpartisipasi, sehingga penanggulangan kebakaran ini dapat dibuat melibatkan seluruh masyarakat,” katanya.

Selain itu, Dewi Coryati juga mengharapkan adanya kerjasama dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang mendapatkan dampak terhadap asap ini. “Mereka perlu memberikan kontribusi nyata atau bantuan, karena mereka mendapatkan dampak tentunya harus juga melakukan kerjasama

ma yang baik, sehingga jika ada kendala dapat dibantu,” tegas Dewi.

Menteri KKLH Siti Nurbaya menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kebakaran hutan dan lahan merupakan kewajiban Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk menanganinya.

Menurutnya, sumber penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah manusia. Hal ini menyangkut kebiasaan dan perilaku serta kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pertanian, konflik lahan, serta ketidaksengajaan.

Dia menambahkan karena akibat dari

ulah manusia tersebut, maka petunjuk Presiden Joko Widodo, yang paling penting adalah niat dan komitmen yang kuat kepada seluruh pemangku kepentingan utamakan langkah pencegahan.

KKLH bersama BNPB, telah mensepakati terminologi Siaga Darurat Bencana. “Kita bersiaga, mempelajari situasi iklim dan kondisi di lapangan yang cenderung akan berbahaya. Hal ini sudah diterapkan di Provinsi Riau,” paparnya.

Selain itu, KKLH telah membangun website dan hotline pengaduan dan menetapkan kondisi darurat bencana yang dikonsultasikan kepada BNPB, dan penekanan pada monitoring titik api,

dan sudah ada sistem diteksi dini, serta operasi gabungan untuk penutupan kanal. Karena pada dasarnya gambut harus basah karena jika kering, gambut akan mudah terbakar.

“Prinsip ada api harus dimatikan, tidak boleh apinya menginap. Meningkatkan kerjama dengan masyarakat memberikan informasi, meminta kepada Pemda, dunia usaha dan masyarakat untuk segera menginformasikan dan sedapat mungkin memadamkan api. Diamping itu, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan memberikan perhatian khusus terhadap lahan gambut,” ungkap Siti Nurbaya. (as), foto : riska arinindya/parle/hr.

Usulan Draf Resolusi DPR Diterima Anggota Sidang APA

DPR RI mengirimkan delegasi ke Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs yang diselenggarakan di Ankara, Turki pada tanggal 19 – 20 Maret 2015, diwakili oleh dua anggota yakni Amrullah Amri Tuasikal (F-Gerindra) dan Syofwatillah Mohzaib (F-PD).

Informasi yang diterima Bagian Pemberitaan DPR Senin (30/3) menyebutkan bahwa, sidang ini dihadiri oleh 12 (dua belas) negara anggota APA yakni: Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Iran, Kamboja, Kuwait, Pakistan, Palestina, Siprus, Turki, Thailand dan Yordania.

Agenda Sidang membahas 4 (empat) resolusi yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya di Sidang Pleno ke-7 APA di Lahore, Pakistan tahun 2014 lalu. Resolusi-resolusi tersebut yakni: *Resolution on Measures and Methods of Materialization of Principles of Friendship and Cooperation in Asia*; *Resolution on Engaging APA with Asian Governments and Inter-Governmental Organization*; *Resolution on Denunciation of Terrorism and Violent Extremism*; dan, *Resolution of Important Political Development*.

Selain itu, sidang juga membahas beberapa isu-isu aktual tentang politik dan keamanan di kawasan Asia.

Pada Sidang ini, Indonesia mengajukan Draft Resolusi *Improving Democracy in Asia*, yang secara tegas menyampaikan pentingnya kesamaan kedudukan masing-masing negara



Delegasi Indonesia di Sidang APA

serta terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berekspresi serta sikap saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dengan mengedepankan prinsip-prinsip non-interference.

Usulan draft resolusi dari Indonesia kemudian diterima oleh para anggota APA untuk dijadikan bagian dalam Draft Resolution on *Advancing Principles of Friendship and Cooperation in Asia* yang diadopsi di akhir Sidang Standing Committee ini.

Selain draft resolusi tersebut, Sidang ini juga menghasilkan 3 (tiga) draft resolusi lain, yaitu: *Draft Resolution on Mobilizing Interaction Between APA and Asian Governments*; *Draft Resolution on Deploring Acts of Terrorism and Violent Extremism*; dan, *Draft Resolution on Significant Political Development*. Draft-draft resolusi tersebut akan disampaikan dan disahkan pada Sidang Pleno ke-8 APA yang akan dilaksanakan di Kamboja bulan Desember 2015. (bksap/mp). foto: bksap/parle/hr

BBM Naik, Pemerintah Tidak Peka dan Berpihak Pada Rakyat Kecil

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Harry Purnomo menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan terkait kondisi real masyarakat hidup dilapis bawah yang terkena langsung dampak kenaikan BBM.

“Saya tidak tahu siapa inisiator yang menaikkan harga BBM ini, dalam konsideran ini jangan hanya melihat kondisi fiskal saja, dan faktor ekonomi makro saja. Ini sektor real yang dimana baik kamu mempunyai maupun tidak mampu langsung terkena dampaknya,” ujarnya saat Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Senin Malam. (30/3).

Dirinya mengusulkan agar kenaikan BBM dikaji ulang dan segera berunding dengan Komisi VII DPR RI. “Kita sudah melihat berbagai aspek seperti soal teknis seperti tata cara penghitungan harga pokok ada banyak hal yang dipertanyakan, kalau pemerintah sensitif tidak perlu ada kenaikan harga BBM. Kami tidak setuju inefisiensi kilang Pertamina ini dibebankan langsung kepada masyarakat.



Anggota Komisi VII DPR Harry Purnomo

Menurutnya, jangan masyarakat dikelabui kenaikan BBM itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dimana itu sebenarnya dari Sektor Pajak. “PPN 10 persen untuk

Ron 88 bisa saja ditiadakan menjadi 5 persen jadi kita bisa menurunkan harga, pemerintah sekarang ini mau enakanya saja harusnya memikirkan soal rakyat bukan membebani,” tegas Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI ini.

Dia menambahkan, Pemerintah sekarang ini Kurang peka dan ada unsur manipulasi atau duplikasi dalam kenaikan BBM ini. “Kita bisa berhemat dari komponen bensin 88 menjadi 7900 bebaskan dengan cara membebaskan pajak BBM untuk PPN,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pembantu Jokowi atau para Menteri Jokowi tidak bisa menyatukan visi dan misinya Nawacita Jokowi. “Kita meminta segera dicek kembali dan mengkaji ulang kenaikan BBM kalau bisa hilangkan pajak kendaraan bermotor, dan PPN itu,” jelasnya. (Sugeng),

foto : naefurodjie/parle/hr.

Pemerintah Diminta Susun Pola Tetap BBM Subsidi



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Nasdem Kurtubi mengusulkan kepada Pemerintah segera menyusun suatu mekanisme pola harga BBM subsidi tetap. Karena, jika terjadi kenaikan harga minyak dunia kembali, masyarakat tetap diberikan dengan harga BBM yang telah disubsidi, serta melakukan

evaluasi kenaikan BBM itu setahun dua kali sehingga tidak menimbulkan gejolak bagi rakyat kecil.

“Dengan cara ini harga kebutuhan pokok bisa stabil dengan ditetapkan setahun sekali dan dievaluasi enam bulan, jadi apabila harga ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga pasar maka kalau harga ditetapkan lebih tinggi dipasar itu ada Labah Bersih Minyak (LBM), kalau yang ditetapkan lebih rendah atau rugi itu namanya resiko fiskal dan Harga tersebut ditetapkan pada awal Januari,” jelasnya kepada Parlemen di Gedung Nusantara I, Senin, (30/3).

Menurutnya, apabila harga BBM turun belum tentu kebutuhan pokok langsung turun. “Jadi acuannya harga internasional MOPS Crude, dan dollar tapi harga minyak mengacu kepada APBN nanti,” papar Anggota DPR dari Dapil NTB.

Terkait inefisiensi di Pertamina, lanjutnya, Pertamina harus didorong melakukan mekanisme impor migas

dengan metode beli langsung ke produsen minyak. “Jadi jangan melalui pihak ketiga (broker) dan bisa saja melakukan kontrak jangka panjang G to G,” katanya.

Dia mengatakan, Komisi VII sangat kecewa dengan kinerja Pertamina, dimana seharusnya perusahaan tersebut melakukan efisiensi dengan serius. “Seharusnya di stop kontrak yang melewati pihak ketiga. Pertamina bisa beli langsung kepada negara produsen minyak misalnya dengan Anggola yang menetapkan harga dibawah MOPS,” jelasnya.

Dia menegaskan, seharusnya perlu dipertimbangkan penurunan pajak BBM sehingga harga BBM subsidi bisa turun. “Perlu dipertimbangkan penurunan pajak BBM, sementara Peraturan Menteri, dan Kepres yang mengatur evaluasi harga satu bulan lebih baik menggunakan harga stabil sekali setahun menggunakan harga crude, Dollar di APBN,” ujarnya. (Sugeng) foto: iwan armanias/parle/hr



Baleg DPR Buat Mekanisme Pengalihan Pembahasan RUU



Wakil Ketua Baleg DPR Saan Mustafa

Badan Legislasi DPR RI (Baleg) saat ini sedang membuat aturan mengenai mekanisme pengalihan pembahasan RUU dari Komisi (Alat Kelengkapan Dewan/AKD) kepada Baleg yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

“Tujuannya untuk mempercepat dan memenuhi target prolegnas prioritas tahunan, karena yang paling mudah diukur oleh publik itu salah satu kinerja DPR adalah capaian legislasi. Itulah yang kita ingin, memaksimalkan fungsi dewan,” kata Wakil Ketua Baleg Saan Mustafa usai Rapat Pleno Baleg dengan Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Saan menjelaskan, DPR punya target RUU Prioritas setiap tahunnya. Untuk tahun 2015 ada 37 RUU prioritas yang harus diselesaikan. “Jika masing-masing Komisi itu 2 RUU jumlahnya baru 22 RUU, ditambah pansus 5 RUU dan Baleg sebagaimana dalam Tata Tertib DPR Pasal 134 dibatasi 2 RUU, baru 29

RUU, berarti masih 8 RUU lagi, siapa yang membahas,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Jika target RUU Prioritas 2015 atau RUU Prioritas tahunan dengan mekanisme yang ada seperti itu, menurut Saan, target RUU tidak mungkin tercapai. “Itulah salah satu alasan mengapa Badan Legislasi ingin tidak dibatasi 2 RUU seperti Komisi,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Saan, Baleg juga ingin ada semacam pengalihan. Jika di Komisi itu pembahasan RUU tidak juga selesai walaupun disitu sudah ada aturannya yaitu 3 kali masa sidang tidak selesai maka itu bisa dialihkan kepada Baleg untuk dibahas.

“Tentunya kita mengikuti mekanisme aturan yang berlaku. Jadi 3 kali masa sidang tidak selesai dan komisi memang disibukkan dengan tugas-tugas yang lain setelah tiga kali masa sidang itu tidak mungkin diselesaikan, maka bisa dialihkan kepada Baleg untuk menyelesaikan UU itu. Tentu saja tetap melalui penugasan Badan Musyawarah,” jelas Saan.

Lebih lanjut dijelaskan Saan, bahwa sampai saat ini RUU yang masuk ke Baleg untuk diharmonisasi baru 2 RUU yaitu UU Pilkada dan UU Pemda. Itu-pun Revisi terbatas. Kedua RUU itu sudah diselesaikan dan sudah disahkan menjadi UU, terkait yang lainnya belum ada.

“Itulah yang menjadi salah satu keprihatinan di Baleg dan kita mencobaantisipasi. Sebenarnya didalam prioritas 2015 itu ada sekitar 15 RUU yang sudah siap untuk diharmonisasi, karena memang ada 11 RUU yang sudah selesai tingkat I pembahasannya di DPR periode lalu, 3 RUU yang sudah diharmonisasi bahkan ada 1 RUU usulan DPR sendiri,” jelasnya.

“Nah ini yang sudah siap semua, sebenarnya sangat memungkinkan bisa selesai di beberapa masa sidang ke depan,” tambahnya mengakhiri. (sc)

foto: naefurodji/parle/hr

Komisi I DPR Minta Pemerintah Selamatkan 23 WNI di Yaman

Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin meminta pemerintah RI segera melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap 23 WNI yang ditangkap petugas keamanan dari pemberontak Syiah Al-Houthi.

“Saya dengar dari KBRI di sana, ada 23 WNI yang ditangkap pemberontak Al-Houthi. Pemerintah harus pastikan lagi kebenaran kabar ini. Pastikan keselamatan mereka, dan WNI yang masih tertahan di sana harus segera dikeluarkan,” ujar Zainuddin di Jakarta, Senin malam, (30/3).

Menurut Zainuddin, situasi di Yaman saat ini sangat tidak stabil dan tidak aman. Kenyamanan sosial dan politik di salah satu negara semenanjung Arab itu telah hilang menyusul serangan



Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin

militer Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk lainnya hingga hari ini. Masih ada sekitar 2000 WNI di Yaman saat ini. Mereka ada yang bekerja sebagai tenaga kerja, ada juga sebagai pelajar.

“Jangan sampai ada korban dari WNI. Kedutaan kita di sana saya yakin sudah melakukan proses evakuasi. Jangan menunggu WNI melapor. Saya harap petugas di KBRI kita di sana proaktif mendata dan menjemput para WNI untuk ke KBRI seterusnya dipulangkan. Karena pasti keluarga yang di sini banyak yang bertanya-tanya keselamatan anggota keluarganya,” jelas anggota Tim Pengawas TKI dari DPR ini.

Seperti di ketahui, ribuan warga negara Indonesia (WNI) masih terjebak dalam peperangan di Yaman. Kabar terakhir, sekitar 23 WNI ditangkap petugas keamanan pendukung pemberontak Syiah al-Houthi. (spy)

foto: andri/parle/hr

UU PPN : Lindungi dan Berdayakan Nelayan

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, subyek utamanya adalah nelayan. Nantinya akan mengatur mengenai perlindungan, dan memberdayakan nelayan dan pembudidaya.

“Ada yang mendasari perlunya nelayan dilindungi dan diberdayakan, sehingga dapat diwujudkan suatu kondisi nelayan yang merupakan subyek hukum potensial memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara,” kata Deputy Perundang-undangan (PUU) Setjen DPR RI, K Jhonson Rajagukguk, Selasa (31/3) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi mengenai RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yang dihadiri jajaran Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Kelautan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya, dan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Jhonson memaparkan Indonesia telah mendapatkan pengakuan sebagai Negara kepulauan. Wilayah Indonesia sebagian besar laut dengan potensi yang besar. Menurut data mengenai potensi perikanan diasumsikan ada 6,51 juta ton pertahun, atau 8,2% dari potensi ikan laut dunia.

Jika dilihat dari populasi jumlah penduduk ada 2,7 juta berstatus nelayan, 70% nelayan berpendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Data statistik 95,6% nelayan tradisional. Tradisional ini sering dikaitkan dengan kondisi ekonominya. Dari data nelayan Indonesia sebagian besar nelayan yang dikategorikan miskin.

“Kenapa dia (nelayan) miskin karena sumber pendapatannya kecil, padahal potensinya begitu besar. Betapa pentingnya membuat sebuah kebijakan dalam bentuk UU Khususnya melindungi nelayan supaya dengan potensi yang ada dapat mengembangkan melalui pemberdayaan nelayan itu sendiri,” tegasnya.



Deputi Perundang-undangan (PUU) Setjen DPR RI, K Jhonson Rajagukguk

Kepala Biro PUU bidang Ekkuindag Nunu Nugraha Khuswara menjelaskan bahwa diskusi ini terkait dengan penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sudah masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2015, dengan nomor urut 14. PUU mendapatkan tugas dari Komisi IV untuk menyusun Naskah Akademik dan Draf RUU, sejak bulan Februari 2015,” ungkapnya. (as), foto : naefurodjie/parle/hr.

Potensi Pariwisata Belum Diimbangi Infrastruktur Memadai

Pariwisata Indonesia memiliki peran strategis dan banyak potensi, diantaranya keindahan alam yang memukau wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Namun sangat disayangkan, potensi ini belum dapat dioptimalkan. Pasalnya, banyak persoalan yang menghambat pengembangan pariwisata Tanah Air. Apalagi, Indonesia menargetkan 20 juta wisman pada tahun 2019.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi X Sofyan Tan, usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kepariwisataan, diantaranya PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT. Taman Wisata Candi (TWC) dan PT. Hotel Indonesia Natour (HIN), di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (30/03/15). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya.

“Indonesia punya potensi pariwisata yang indah dan daya tarik tersendiri, tetapi tidak bisa maju-maju. Persoalannya adalah manajemennya yang kurang baik. Turis yang berwisata ke Indonesia pasti ingin menikmati alam yang ada di Indonesia, bukan ingin susah dengan masalah transportasi dan infrastrukturnya,” jelas Sofyan.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, sebenarnya persoalan pariwisata itu sangat sederhana. Menurut Sofyan, yang perlu diperbaiki adalah keamanan, infrastruktur, dan servis. Soal keindahan alamnya, ia menilai tidak perlu diragukan lagi.

“Ketika orang berwisata yang pasti adalah untuk melepaskan kepenatan, mencari kebahagiaan, dan kesenangan, sehingga jika datang ke suatu tempat yang tidak nyaman dan tidak aman, bagaimana mungkin dapat menikmati?” katanya seolah bertanya.

Untuk itu, tambah Politisi asal Dapil Sumatera Utara ini, perlu ada sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk membangun infrastruktur di daerah potensi pariwisata.

“Menurut saya, seharusnya ada kebijakan yang mengharuskan Kementerian Pariwisata dengan Kemen PU harus berjalan dan bergandengan tangan. Apabila sudah diputuskan suatu daerah menjadi daerah tujuan utama pariwisata yang bisa meraup keuntungan, maka bisa dihitung investasi dengan infrastruktur, dan termasuk kapan kembali modalnya,” tambah Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, *mindset* mengenai pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan, mengingat pariwisata selain memberikan pemasukan devisa, juga memberikan dampak penghasilan kepada sektor riil sektor informal.

“Saya kira pariwisata itu akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, apabila kita berhasil melakukan membangun pariwisata seiring dengan pembangunan infrastruktur,” harap Sofyan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. TWC Laily Prihatiningtyas menjelaskan, masalah umum yang dihadapi pengembangan pariwisata Indonesia adalah infrastruktur, terutama infrastruktur bandara atau transportasi. Selain itu, perlu pengembangan pengelolaan kawasan strategis pariwisata di daerah lain termasuk pulau-pulau kecil yang memiliki potensi, sehingga pariwisata tidak terkonsentrasi di kota-kota yang memang sudah dikenal



Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan

potensi wisatanya.

Di akhir rapat, Komisi X memberi catatan kepada PT. ITDC, PT. HIN, dan PT. TWC untuk dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan dan pengembangan bidang pariwisata di Indonesia, sehingga kontribusi bidang pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto secara nasional dapat meningkat. Terhadap semua permasalahan yang disampaikan oleh seluruh BUMN kepariwisataan, Komisi X akan menindaklanjuti dalam rapat kerja dan RDPU dengan pemerintah utamanya dengan Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (sf,gt), foto : naefurodji/parle/hr.

Berantas Pembajakan Butuh Ketegasan Penegak Hukum

Pembajakan, khususnya pembajakan musik sekarang ini sudah menjamur dimana-mana. Ironisnya, belum ada ketegasan dari pemimpin maupun penegak hukum untuk memberantasnya. Sehingga, pembajakan pun semakin tumbuh subur di Indonesia.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X Dadang Rusdiana usai RDPU antara Komisi X dengan Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (30/03/15) ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam.

“Kalau kita lihat memang perkembangan musik di Indonesia itu pada kenyataannya sungguh luar biasa, tapi kemudian banyak para seniman, pencipta lagu, dan seniman yang nasibnya tidak karuan. Persoalannya karena royalti itu tidak dapat mereka terima dengan sebenar-benarnya. Masalah pembajakan musik ini membutuhkan ketegasan kepemimpinan, serta keseriusan dari penegak hukum,” tegas Dadang.

Politisi Fraksi Hanura ini menambahkan, akibat pembajakan musik ini, negara dirugikan hingga mencapai Rp 1,4 triliun setiap tahunnya. Apalagi, ia menilai, Pemerintah berganti dari periode ke periode berikutnya, belum ada satu rezim pun yang benar-benar konsisten dan tegas menegakkan hukum kepada pelaku pembajakan.

“Terlepas sekarang sudah ada UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tapi nampaknya belum ada satu pun yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadikan efek jera, misalkan membawa pelaku pembajakan pengadilan, kemudian belum ada satu pun pusat perbelanjaan yang dikenakan sanksi



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

atau dituntut, karena ada penjualan kaset bajakan,” heran Dadang.

Namun, Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini menyangkan, Pemerintah belum terkesan serius mengimplementasikan UU No 28 Tahun 2014. Ia melihat, Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari UU tersebut, walaupun sudah ada Peraturan Menteri. Namun, Permen dirasa belum memiliki kekuatan sebanding PP.

“Jadi kalau Pemerintahan Jokowi menyatakan komitmen dengan ekonomi kreatif yang di dalamnya ada musik yang potensinya luar biasa, seyogyanya Pemerintah juga segera menerbitkan beberapa peraturan pemerintah sehingga UU Hak Cipta ini benar-benar bisa dilaksanakan,” tegas Dadang.

Sebelumnya, salah satu perwakilan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Yusak, menjelaskan bahwa 92 persen album yang di pasar adalah bajakan dan sekitar 7,9 juta lagu diunduh secara ilegal per harinya. Akibat pembajakan, ia menyatakan hingga kini royalti sulit tertagih dan membuat para pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. (sf,rn), foto : naefurodji/parle/hr.

Setjen DPR Gelar Tes Narkoba

Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar kegiatan tes narkoba. Program ini yang diikuti oleh seluruh anggota dewan dan karyawan ini diharapkan membangun kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya narkoba.

“Tes narkoba ini membangun kesadaran sekaligus mengkampanyekan bahaya narkoba bagi bangsa. Kegiatan ini secara bertahap akan melibatkan semua mulai dari anggota dewan sampai karyawan,” kata Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti usai melakukan tes di Klinik Yankes, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/15).

Pada hari pertama menurutnya tes lewat media air seni akan diikuti oleh pejabat eselon satu dan dua di Kesetjenan. Khusus bagi anggota DPR jadwal tes akan diatur oleh fraksi terkait. Win begitu ia biasa dipanggil berharap tes akan dapat diselakan dalam waktu empat hari.

Bicara pada kesempatan yang sama Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Dik Dik Kusnadi mengatakan tes narkoba di DPR diharap-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti berdialog dengan Pejabat BNN

kan menjadi contoh bagi masyarakat dan lembaga/institusi negara lainnya. “Tentu kita berharap DPR menjadi contoh. Harapan kami semua menjadi waspada tidak mudah terjebak narkoba,” tutur dia.

Ia menambahkan serangkaian tes yang juga dilakukan di sejumlah lembaga/institusi negara diharapkan dapat membantu mewujudkan lingkungan bersih narkoba. “Jadi bukan hanya

pakta integritas soal meningkatkan kinerja tetapi juga pakta integritas anti narkoba,” papar dia.

Ketika ditanya tentang sanksi yang diberikan apabila ada peserta tes yang terbukti positif sebagai pemakai narkoba, Dik Dik mengatakan akan dilakukan pembinaan. Langkah pembinaan itu menurutnya diserahkan kepada pimpinan setempat sesuai aturan yang berlaku. (iky) foto: rizka/parle/hr



Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi mensinyalir adanya peran mafia migas dalam kenaikan BBM bersubsidi.

“Pemberantasan mafia migas seperti obat penyejuk di masyarakat, padahal praktiknya masih berjalan sampai sekarang. Sepertinya Menteri ESDM tidak dalam kapasitasnya memberantas mafia Migas,” tegasnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said,

DPR Sinyalir BBM Subsidi Dikuasai Mafia Migas

di Gedung Nusantara I, Senin malam, (30/3).

Menurutnya, terkesan adanya *invisible hand* terkait BBM bersubsidi. “Hal ini jangan sampai kita semua kecewa karena pemerintah tidak dapat membongkar dan memberantas mafia migas,” jelasnya.

Dia mengatakan, Komisi VII DPR sempat memberikan saran kepada pemerintah agar mengusulkan kepada Komisi VII agar melakukan subsidi secara tetap untuk premium. “Kita sempat menawarkan subsidi tetap 1000 rupiah untuk premium namun pemerintah menolaknya,” paparnya.

Mulyadi mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan

harga BBM subsidi secara mendadak. “Saya sangat kecewa terhadap kenaikan BBM yang mendesak dan mendadak. Terkait kenaikan ini kita tidak dapat menjelaskan secara komprehensif kepada konstituen kita,” katanya.

Dia menyoroti masih adanya ketidakefisienan Pertamina dalam mengelola BBM bersubsidi. “Artinya jangan sampai ketidakefisienan Pertamina ini dibebankan kepada masyarakat, harga keekonomian terlalu tinggi, Dollar naik ini jadi persoalan tersendiri, dahulu sebelum kenaikan BBM itu ada program jaring pengaman sosial bagaimana ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah?,” paparnya. (Sugeng), foto: naefu-rodjie/parle/hr.



Kartu BPJS Kesehatan di Papua Belum Bermanfaat

Anggota Komisi IX DPR RI dari Papua Robert Rouw menyatakan sampai saat ini kehadiran Kartu BPJS Kesehatan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karenanya, ia minta Roadmap pembangunan kesehatan di Papua kepada Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F. Moeloek.

“Pemerintah harus hadir di Papua untuk menjamin kesehatan masyarakat Papua. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke daerah pemilihan saya itu, sampai saat ini kehadiran BPJS atau pelayanan kesehatan di Papua, orang Papua merasa BPJS tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Papua,” tegas Robert saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Ia mempertanyakan mengapa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 110 Tahun 2012 dicabut. Padahal menurutnya dengan adanya Kepmen tersebut, banyak menolong masyarakat Papua karena menjamin masyarakat Papua untuk berobat di seluruh Rumah Sakit-Rumah Sakit pemerintah.

“Dengan dicabutnya Kepmen ini dan berlakunya aturan yang baru yaitu BPJS Kesehatan, maka saat ini semua harus mempergunakan Kartu BPJS Kesehatan,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Dijelaskan Robert, Kepmen Nomor 110 Tahun 2012 ini lahir karena ada tiga pertimbangan penting pemerintah. Pertama, tentang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk Papua dan Papua Barat masih tersisa banyak, jadi alokasi melebihi jaminan penduduk yang ada baik penduduk asli maupun bukan penduduk asli.

Kedua, banyak sekali penduduk Papua dan Papua Barat yang sebenarnya masuk kelompok tidak mampu/miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.

Ketiga, kondisi geografis Papua dan Papua Barat yang sangat sulit untuk mendata satu persatu penduduk di wilayah yang begitu luas.

“Berbicara mengenai kesulitan yang ada di Papua, saya kira Kepmen Nomor 110 sangat adil untuk diterapkan lagi di Papua, karena tidak mungkin orang Papua itu bisa dijangkau seluruhnya dengan persyaratan yang begitu memberatkan dengan BPJS ini,” ujar Robert.

Untungnya, lanjut Robert, pemerintah Papua masih menjalankan ketentuan Kartu Papua Sehat (KPS). Menurut Robert, KPS sangat bermanfaat bagi Papua.

Menurut Robert, jarak antara Puskesmas dan kampung penduduk sangat jauh, berdasarkan peraturan BPJS Kesehatan, kalau dia harus ke Puskesmas dulu baru ke Rumah Sakit



Anggota Komisi IX DPR RI Robert Rouw

maka biayanya menjadi 4 kali lipat, dibanding jika dibawa langsung ke rumah sakit.

Robert setuju jika sebaiknya KPS harus tidak berlaku lagi di sana karena negara harus hadir di tengah-tengah rakyat Papua untuk memberikan jaminan, tidak lagi pemerintah daerah dengan KPS dan itu adalah dana otsus yang bisa dipakai untuk menyiapkan fasilitas/kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan melalui infrastruktur kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut Robert menyampaikan, bahwa tingkat kematian Ibu dan anak di Papua menurun drastis, kematian Ibu dari 100 ribu penduduk saat ini sudah diangka 500, dan sejak diberlakukannya KPS turun hingga 300 orang. Sementara Kematian anak juga menurun, sampai saat ini diangka 800.

Ia juga minta penjelasan Menkes dan Kepala BPJS Kesehatan tentang program Penyatuan/Peleburan KPS kedalam BPJS Kesehatan. (sc) foto: *naefurodji/parle/hr*

Komisi VII DPR Sepakati Sembilan Butir Soal Kenaikan BBM Subsidi

Komisi VII DPR bersama dengan Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said menyepakati sembilan butir terkait kenaikan BBM Subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha menjelaskan, kesepakatan atau kesimpulan pertama yaitu meminta Menteri ESDM mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga BBM.

“Meski kesepakatan ini sifatnya mempertimbangkan, apapun hasilnya



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

nanti, pemerintah harus menyampaikan hasilnya ke DPR. Kalau alasan pemerintah menolak pertimbangan tersebut logis, maka Komisi VII DPR bisa merevisi kesepakatan tersebut,” kata Satya di Gedung Nusantara I, Senin malam, (30/3).

Dia menekankan, apabila kesepakatan tersebut tidak dijalankan, sesuai dengan UU MD3, Komisi VII bisa membawanya ke tingkat sidang paripurna. “Jadi jangan sampai tidak dijalankan, tentu akan ada sikap kami,” kata poli-

tikus Partai Golkar ini

Kesepakatan kedua lanjutnya, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi secara massif tentang mekanisme atau skema pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat.

“Kesepakatan ketiga yaitu, Komisi VII DPR juga meminta Menteri ESDM agar menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penghapu-

san PPN jenis BBM dan LPG yang bersubsidi,” katanya.

Pada kesimpulan keempat, paparnya, Komisi VII meminta Menteri ESDM melakukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperbaiki dan membersihkan penyebab inefisiensi tata kelola BBM termasuk karena adanya kontrak-kontrak impor minyak mentah, BBM dan LPG yang bermasalah.

“Untuk point kelima, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM agar mengusulkan kepada Pertamina melalui Menneq BUMN untuk meninjau kembali dan segera melakukan pemutusan kontrak apabila pengadaan BBM RON 88 melalui Petral (PES) yang jelas-jelas merugikan,” terangnya. (Sugeng), foto : [naefurodjie/parle/hr](#).

DPR Minta Pemerintah Kaji Komprehensif Pemberlakuan Kembali UU No. 11/ 1974



Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakuan kembali UU No. 11 tahun 1974 serta menyesuaikan peraturan pelaksanaannya.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono dan Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis di Gedung Nusantara, Selasa Sore, (31/3).

Didalam kesimpulannya yang kedua, Komisi V DPR RI sepakat dengan kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyusun RUU

mengenai SDA untuk segera diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI.

Kesimpulan berikutnya, Komisi V DPR RI mendukung upaya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan mempercepat proses ijin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan terhadap proyek yang tengah berjalan.

“Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian LH dan Kehutanan sepakat di masa mendatang pelaksanaan konstruksi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di dalam kawasan hutan dapat dilakukan secara paralel dengan proses keluarnya ijin penggunaan hutan tersebut,” ujar Fahri. (Sugeng) foto: [rizka/parle/hr](#)

Komisi V DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P Yoseph Umar Hadi mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu terkait keputusan MK yang membatalkan seluruh UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam.

“Saya sangat prihatin yang mendalam atas keputusan MK yang membatalkan seluruh UU No. 7 tahun 2004 tentang SDA yang telah dipakai selama kurun waktu 11 tahun dan telah menghasilkan produk bagi masyarakat,” ujarnya saat Raker Komisi V DPR

dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono dan Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis di Gedung Nusantara, Selasa Sore, (31/3).

Menurutnya, dengan pembatalan seluruh UU No. 7 tahun 2004 ini berakibat semua produk turunannya batal demi hukum atau dianggap ilegal. “UU itu sebenarnya berdampak baik



Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi

bagi masyarakat, namun karena persoalan mata air ini menyebabkan UU itu dibatalkan,” jelasnya.

Akibat UU tersebut dibatalkan oleh



MK, lanjutnya, maka memiliki implikasi hukum yaitu adanya kekosongan hukum. Pasalnya, di dalam amar MK itu berlaku UU No. 11 tahun 1974. “Itu atas dasar apa MK memberlakukan UU itu berlaku kembali, dimana letak

kewenangan MK memberlakukan UU itu kembali,” terangnya.

Dia menambahkan, apabila UU lama tetap berlaku tentunya PP yang merujuk UU No. 11 tahun 1974 keabsahannya patut dipertanyakan. “Seharusnya

pemerintah segera mengeluarkan Perppu karena keadaan mendesak yaitu untuk mengisi kekosongan terkait pembangunan SDA kedepan,” kembali dia menegaskan. (Sugeng) foto: rizka/parle/hr

DPR Pertanyakan Peran Negara Dalam Pengelolaan SDA

Terkait pembatalan seluruh UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wilem Wandik menegaskan, keluarnya UU tersebut dahulu diiringi dengan berbagai konflik antar warga dengan beberapa Perusahaan Air seperti Cirebon, Klaten, Salatiga, Magelang maupun Sukabumi.

“Hampir 200 perusahaan mengkooptasi SDA, dan kondisi privatisasi SDA mirip terjadi dalam penguasaan alam skala besar seperti ribuan hektar dengan dalil kontrak karya seperti penguasaan lahan Freeport Indonesia yang luasnya jutaan hektar,” jelas Anggota Dapil Papua ini, saat Raker Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono dan Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis di Gedung Nusantara, Selasa Sore, (31/3).



Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wilem Wandik

Dirinya mengaku senang dengan keluarnya keputusan MK yang mem-

batalan UU No. 7 Tahun 2004 karena memang UU tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. “Yang paling parah prakteknya yaitu mengabaikan peran masyarakat adat setempat yang bermukim di daerah itu. Dalam kasus perkebunan itu juga hampir sama. HGU perkebunan kerap berada di dalam pemukiman warga peribadatan,” jelasnya.

Dia menambahkan, kita juga bisa melihat bersama bahwa di Papua khususnya di Wilayah Kerja PT Freeport, kerap kali mengabaikan hak ulayat adat atas hak tanahnya sendiri. “Peran negara sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Tetapi beralih dan berbalik melegitimasi pada kaum pemilik modal atau individual,” katanya.

Menurutnya, kita semua perlu mempertanyakan peran negara dalam mendukung atau melegitimasi masyarakat yang semakin terpinggirkan ini. (Sugeng) foto: rizka/parle/hr

Komisi VI Keluhkan CPO Belum Bisa Masuk Pasar Jerman

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyayangkan ekspor CPO Indonesia belum bisa masuk pasar Jerman. Padahal, ekspor industri otomotif Jerman begitu maju dan diterima di Indonesia. Ketimpangan ini menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Jerman.

Hal itu dikemukakan Hafisz saat mendampingi Pimpinan DPR menerima kunjungan kehormatan Presiden Parlemen Jerman Norbert Lammert, Selasa (31/3). Indonesia sangat senang bisa mengadopsi teknologi Jerman. Dan Jerman sendiri sudah mengambil keuntungan dari kerja samanya dengan Indonesia di berbagai sektor. Namun, suasananya terbalik dengan Indonesia, karena neraca perdagangannya mengalami defisit. Sebaliknya, Jerman justru surplus.

“Kami begitu senang melihat teknologi otomotif Jerman. Begitu banyak Mercedes Benz di Indonesia, tetapi tidak se-



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

dikitpun minyak goreng kami bisa masuk ke negara Anda,” ungkap Hafisz kepada Lammert. Lammert sendiri, kata Hafisz, tercengang dengan pernyataannya itu. Lagi-lagi, Pemerintah Jerman masih membawa sentimen lingkungan di balik penolakan CPO Indonesia masuk pasar Jerman dan Eropa.

Ternyata, ekspor CPO Indonesia diatur oleh Uni Eropa, sehingga menyulitkan masuk pasar Eropa. Hafisz sendiri sudah meminta Parlemen Jerman untuk membantu ekspor CPO Indonesia bisa masuk Eropa atau setidaknya diterima pasar Jerman. “Jadi, apapun yang akan diekspor ke Jerman, Uni Eropa yang mengatur,” jelas politisi PAN dari Dapil Sum-sel I itu.

Argumen penolakan CPO Indonesia, lantaran kelapa sawit penghasil CPO ditanam dengan merusak lingkungan. Selama isu lingkungan ini belum bisa dirubah, selama itu

pula ekspor CPO masih sulit masuk. “Ini menjadi PR besar kita. Saya sebetulnya sudah tahu persoalan ini. Tapi, saya memancing, kenapa mereka tidak mau membantu kita menyelesaikan masalah ini. Kita, kan, perlu dukungan politik mereka supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara bilateral.”

Dikatakan Hafisz, penghasil CPO di dunia tidak banyak. Hanya beberapa negara tropis yang bisa memproduksinya. Dan negara tropis itu Malaysia, Indonesia, Thailand, Brazil, Venezuela, dan Tanzania. Tapi Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. “Kita buang ke mana ekspor CPO ini. Ya, hanya ke Cina. Ketika negara-negara lain enggan bersahabat dengan Cina, dia malah buka opsi dagang dengan kita. Nah, itulah kelebihan Cina,” papar Hafisz. (mh) foto: [naefurodji/parle/hr](#)

Kemenkominfo Perlu Buktikan Situs Islam Dorong Terorisme

Langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs Islam dinilai merupakan langkah yang keliru. Apalagi kebijakan itu diambil setelah mendengar pertimbangan dari BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme) tanpa masukan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

“Keliru besar memblokir situs tanpa membuktikan sudah ada orang yang menjadi teroris setelah membaca situs Islam. BNPT tidak punya otoritas untuk menilai situs membelajarkan teror, yang punya otoritas itu adalah MUI,” kata anggota Komisi I DPR RI, El Nino di Gedung Parlemen, Senayan,



Anggota Komisi I DPR El Nino Husein Mohi

Jakarta, Rabu (1/4/15).

Lebih jauh ia mengingatkan kebijakan pemblokiran situs Islam ini

dapat berkembang menjadi isu yang menciptakan *stereotype* terorisme di Indonesia hanya dari kalangan Islam sedangkan yang bukan Islam adalah pemberontak.

Bicara pada kesempatan yang berbeda Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan akan segera memanggil Menkominfo untuk mengklarifikasi hal ini. Baginya kebijakan pemblokiran tersebut terlalu terburu-buru.

“Kebijakan Menkominfo ini terlalu gegabah, jangan sampai pemerintah dicap Islamophobia. Kita akan undang Menkominfo menjelaskan dalam dua pekan ini,” pungkask dia. (iky) foto: [andri/parle/hr](#)

Anggota Komisi Agama Sesalkan Pemblokiran 19 Website



Anggota Komisi VIII DPR H Anda

Anggota Komisi VIII DPR RI, H Anda menyesalkan adanya pemblokiran dan penutupan Sembilan belas situs (website) yang diduga menyebarkan paham radikal dan terorisme oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

“Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi keagamaan, saya sangat menyesalkan adanya pemblokiran dan rencana penutupan 19 (sembilan belas) website tanpa terlebih dahulu menjelaskan kriteria dan standarisasi

penilaian yang dimaksud dengan radikalisme dan terorisme. Terlebih lagi situs tersebut identik dengan agama tertentu, yakni Islam,” jelas Anda.

Ditambahkan Anda, negara kita merupakan Negara Pancasila yang memiliki keanekaragaman agama, suku dan ras, sehingga sangat tidak bijak jika karena situs tersebut bernuansa Islami langsung diidentikan dengan radikal dan terorisme.

Politisi dari Dapil Banten I ini malah mencurigai jika pemblokiran atau

penutupan situs-situs ini hanya sebagai pengalihan isu di masyarakat atas gejolak ekonomi yang terjadi belakangan. Sebut saja nilai tukar rupiah yang semakin melemah, kenaikan harga BBM dan harga beberapa bahan pokok.

Lebih lanjut Anda mengatakan akan segera mendiskusikan hal tersebut dengan Komisi I yang menaungi bidang

komunikasi dan informasi. Bahkan bukannya tidak mungkin pihaknya juga akan meminta masukan dari MUI (majelis ulama Indonesia) dan beberapa organisasi keagamaan lainnya. Jika dari hasil diskusi tersebut nanti terbukti situs-situs tersebut berbahaya karena menyebarkan paham radikal. Ia tidak segan untuk mendukung ditutupnya situs tersebut.

Namun jika kemudian hasil diskusi dan penyidikan sebaliknya, ia akan segera mendesak Kemkominfo dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan teroris) untuk segera mencabut pemblokiran tersebut. Hal tersebut semata demi kemaslahatan umat, karena bukan tidak mungkin situs tersebut malah bermanfaat bagi umat.

(Ayu) foto: andri/parle/hr

Kebijakan Fiskal Belum Serious



Suasana Workshop Kebijakan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal yang selama ini diambil tidak secara jelas mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya minimal, misalnya untuk kebijakan untuk membuka lapangan kerja. Kebijakan fiskal harus diuji, karena dikhawatirkan melanggar konstitusi atau bahkan menjauhkan Indonesia dari cita-cita konstitusi. Kebijakan fiskal juga dinilai tidak serius.

“Contoh sederhana kebijakan fiskal, mengakibatkan adanya kesenjangan kaya dan miskin semakin terlihat. Apa saja yang dilakukan kebijakan fiskal selama ini, bukannya semakin merata kok malah semakin lebar,” geram Revrison Baswir, dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, saat menjadi narasumber di Workshop Kerjasama Setjen DPR dengan CORE Indonesia, bertajuk ‘Kebijakan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial’ di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Rabu (1/04/15).

Persoalannya, tambah Revrison, apakah selama disadari atau tidak kebijakan fiskal memang dirancang untuk mengoreksi kesenjangan atau justru malah tidak kearah sana sama sekali.

“Kalau dilihat perkembangan selama ini terus terang saya bertanya-tanya. Jangankan kebijakan fiskal dipakai sebagai alat transformasi menuju amanat konstitusi atau jangan-jangan dipakai untuk tujuan sebaliknya,” kata Revrison seolah bertanya.

Ketika ditanya bagaimana peran DPR dalam kebijakan fiskal, Revrison menyatakan bahwa DPR memiliki peran bukan hanya penentuan APBN, tetapi juga ketika menyusun program legislasi. Mengingat, setiap rupiah yang ditentukan dalam APBN, tentunya memiliki landasan hukum, yang merupakan produk dari Dewan.

“Itulah masalahnya, kalau kita membicarakan kebijakan fiskal kita tidak hanya berbicara rupiahnya. Setiap sen di APBN itu pasti ada dasar hukumnya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang itu adalah mengapa banyak sekali UU yang melanggar konstitusi,” tambah Revrison.

Ia berpesan, jangan sampai kebijakan fiskal yang seharusnya dipakai untuk alat transformasi dan untuk mengamalkan konstitusi, jangan malah dipakai untuk melawan konstitusi.

Ditemui usai acara, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Satyanto Priambodo menyatakan tujuan diadakannya workshop ini adalah memberi masukan-masukan kepada Anggota Dewan, untuk mendukung tugas dan fungsinya masing-masing di komisi maupu Alat Kelengkapan Dewan.



Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Satyanto Priambodo

“Dalam mengambil kebijakan yang bersifat strategis nantinya Anggota Dewan mempunyai bahan dan referensi. Kalau kita cermati dari narasumber tadi, banyak hal-hal yang terkait dengan tugas Anggota Dewan,” jelas Nanang, panggilan akrab Satyanto.

Nanang menjelaskan, workshop ini merupakan salah satu dari rangkaian Workshop Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional. Workshop berikutnya akan diadakan pada 8 dan 13 April 2015. Selain Revrison, narasumber lain yang menjadi pembicara adalah Hendri Saparini dan Edi Prio Pambudi. (sf) foto: rizka, andri/parle/hr

Panja PB Komisi VIII DPR Terima Aduan Gubernur Sultra



Ketua Komisi VII DPR Saleh P Daulay dan Gubernur Sultra

Panitia Kerja Penanggulangan Bencana (Panja PB) Komisi VIII DPR RI menerima sejumlah masukan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Salah satunya terkait minimnya perhatian pusat terhadap penanganan bencana. Hal tersebut terungkap saat kunjungan spesifik Komisi VIII ke Kendari, Kamis (26/3).

“Tadi dikatakan Gubernur bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat minim. Dan kami mengakui hal itu, distribusi anggaran pada penanggulangan bencana di daerah ini (Sultra) memang masih minim jika dibanding provinsi

lain di Kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itulah tujuan kami datang ke daerah ini untuk mendengar dan melihat langsung seberapa jauh perhatian pemerintah pusat melalui kurban anggaran dalam penanggulangan bencana. Melalui panja bencana, Pemda diharapkan bisa memetakan hal-hal menyangkut penanggulangan seperti regulasi, penanganan infrastruktur dan besar anggaran yang dibutuhkan,” papar Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay.

Ditambahkan Saleh, dengan anggaran yang relatif besar yakni sekitar Rp 2,5 triliun, Sultra seharusnya masih dapat kurban dana penanggulangan

bencana. Namun tentu pemerintah harus bisa memberikan gambaran terkait upaya penanggulangan bencana di daerahnya. Nah, dengan adanya aduan atau masukan dari Gubernur Sultra ini, maka Komisi VIII memiliki alasan kuat agar pemerintah memetakan anggaran bencana secara adil dan merata.

“Paling tidak, distribusi anggaran di dua instansi yang memiliki tupoksi penanggulangan dan penanganan bencana dan menjadi mitra kerja Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dapat lebih jelas,” katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Tim Panja Penanggulangan Bencana Komisi VIII yang terdiri dari Ledia Amalia Hanifa, Itet Tridjajati S, Anda, Linda Megawati, Desy Ratnasari, Achmad Mustaqim, Abdul Fikri Faqih, Ani’im F Mahrus ini, Gubernur Sultra Nur Alam menceritakan bencana banjir yang terjadi dua tahun lalu di daerah yang dipimpinnya itu.

“Dua tahun lalu di Konawe, Konse, Bombana dan Kota Kendari sebagian besar terendam. Di Kendari saja, sekitar dua pertiga kota sudah tenggelam. Tidak hanya kerugian materi yang sangat besar, namun juga ada satu korban jiwa saat peristiwa itu. Tapi apa? tidak ada bantuan dari pusat, anggaran pun mandek. Sementara daerah lain walau hanya banjir kecil namun bantuan dan anggaran mengalir deras. Disini saya melihat penanganan bencana yang terkesan pilih-pilih. Oleh karena itu saya berharap Komisi VIII DPR dapat memberi masukan terhadap pemerintah pusat terkait penanggulangan bencana ini,” ungkap Nur Alam. (Ayu), foto: ayu/parle/hr.

Komisi VIII Pertanyakan Peran TNI Tangani Bencana Sultra

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Amalia Hanifa mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk peran serta TNI dan Polri dalam penanganan bencana di daerah Sulawesi Tenggara.

“Saya ingin mengetahui sejauh ini kesiapan dari seluruh SKPD terkait termasuk TNI dan Polri dalam penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena sebagaimana dikatakan Pak Gubernur bahwa Sultra memiliki resiko



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR saat pertemuan dengan Gubernur Sultra

bencana yang besar, mulai dari banjir, tanah longsor dan gempa bumi,” ujar Ledia dalam pertemuan dengan Gubernur Sultra, Nur Alam di ruang rapat Sangia Ni Bandera, Kendari Sulawesi Tenggara, Kamis (26/3).

Terlebih lagi dilanjutkan Ledia Kendari memiliki Teluk tempat bersatunya lebih dari lima muara sungai. Kondisi demikian menyebabkan material-material dari hulu akan terbawa semua. Hal tersebut sangat beresiko akan terjadinya bencana banjir sebagaimana yang terjadi pada 2013 silam.

Menjawab hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara,

Nur Alam mengungkapkan bahwa selama ini Sultra seolah bergerak sendiri ketika terjadinya bencana. Dengan begitu daerah yang dipimpinnya itu bisa dikatakan harus siap dengan bencana yang akan datang. Sementara itu Danrem 143 Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridho Hermawan mengatakan bahwa pihaknya (TNI) selalu siap berada di depan ketika bencana datang. Karena TNI memiliki fungsi perang dan non perang yang salah satunya adalah penanganan bencana.

Namun diungkapkan Ridho, pihaknya tidak memiliki payung hukum yang jelas terhadap penanganan bencana. Karena dalam Undang-undang yang ada, penanggulangan bencana menjadi Tupoksi dari BNPB, Kemensos, Kemendagri dan Kemehut.

“Mereka (TNI) bergerak dan berada di depan ketika ada bencana, namun secara teknis mereka tidak memiliki anggaran dan payung hukum yang jelas atas penanganan bencana. Untuk itu kami akan bahas hal ini lebih lanjut, apakah hal itu akan diletakkan dalam Undang-undang atau cukup hanya dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah lainnya saja. Dan kami akan mendiskusikannya dengan Komisi satu karena TNI berada di Komisi I, sementara bidang penanganan bencana ada di Komisi Delapan,” papar Politisi dari Dapil Jawa Barat IV ini. (Ayu), foto : ayu setiawati/parle/hr.

Komisi III DPR mendesak supaya 10 tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kabur segera ditangkap kembali. Kejadian ini jangan dianggap kecil, sebab narkoba adalah musuh besar bangsa sehingga harus mendapat perhatian secara khusus.

Hal itu mengemuka saat Komisi III DPR dipimpin Ketuanya Azis Samsudin saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi rutan BNN serta dialog dengan Kepala BNN Anang Iskandar dan jajarannya di gedung BNN Cawan Jakarta, Rabu (1/4) sore.

Anggota Komisi III Masinton Pasaribu meminta kaburnya tahanan BNN jangan dikatakan kelalain, karena diduga ada kerja sama dengan orang dalam. “Kalau kelalain akan ditertawakan masyarakat. Karena di ruang itu ada CCTV dan penjaga, di sisi lain ada ruang kontrol yang memantau. Tidak mungkin para tahanan lolos, kalau penjaga rutin mengontrol sebab menggergaji dan menjebol tembok ada suara keras,” ujarnya.

Rekannya Misbakhun yang pernah menjalani tahanan menyatakan tahu kondisi psikologis para tahanan dan penjaga. “Jadi janganlah ini dianggap kelalain. Kasus ini sudah terjadi, tapi bagaimana caranya membenahi sistem keamanan lapas supaya tidak terulang kembali,” katanya.

DPR Desak BNN Segera Tangkap Tahanan Kabur



Tim Komisi III DPR tinjau ruang tahanan BNN

Sementara Yayuk Srirahayuningsih mengatakan, kejadian ini merupakan hal yang luar biasa, jangan dianggap sepele. Ia mempertanyakan, bagaimana sistem keamanan tahanan narkoba dan berapa karyawan berperan di saat ke-

jadiannya. Jangan ada kesan di masyarakat BNN bisa diatur. “Bagaimana akan memerangi narkoba kalau garda terdepan kita bisa diatur,” ungkap Yayuk.

Ketua Komisi III DPR Azis Samsudin menambahkan, terkait sarana dan

prasarana serta ijin-ijin yang berkaitan dengan perlengkapan dalam hal mengantisipasi penjangkauan keamanan para tahanan, Komisi III akan membicarakan dengan Plt Kapolri pada saat Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Plt Kapolri Kamis (2/4).

“Masukan dari Kepala BNN Anang Iskandar mengenai masalah pengamanan tahanan narkoba, termasuk

kurangnya SDM, kami berharap Polri dapat memberikan semua kebutuhan yang diperlukan BNN,” ujarnya.

Mengenai indikasi adanya keterlibatan orang dalam, Azis mengatakan sekarang sedang diselidiki pihak Polri, sebab penyelidikan dan penyidikan adalah wewenang Polri sehingga BNN menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.

Kepala BNN Anang Iskandar mengakui, tenaga keamanan memang masih dirasakan kurang hanya sembilan orang, maka perlu ditambah. Karena organisasi BNN masih baru dan tidak ada anggota yang menjaga tahanan maka minta bantuan Polri. (spy), foto : andri/parle/hr.

Rumah Sakit Regional Perlu Ditambah

Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana membangun rumah sakit (RS) daerah menjadi RS regional. Pasalnya, banyak RS daerah yang bertipe C tak mampu melayani pasien dalam jumlah banyak. Kemenkes menggelontorkan anggaran Rp1,5 triliun dari APBN untuk rencana tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin menyambut gembira rencana Kemenkes menambah pembangunan RS regional di daerah. Bahkan, ia berharap agar anggaran Kemenkes untuk pembangunan RS ditambah sesuai amant UU yang mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD provinsi/kabupaten.

“Saya setuju dengan rencana tersebut. Kondisi rumah sakit di daerah selalu membludak dengan pasien hingga banyak yang tak mendapat layanan dengan baik. Kadang pasien yang mau dioperasi saja harus menunggu tiga bulan lebih. Bahkan, saya mendorong, agar dibangun rumah sakit tipe D di



Anggota Komisi IX DPR Hamid Noor Yasin

setiap distrik kabupaten,” kata politisi PKS tersebut, Selasa (31/3) saat dihubungi di DPR.

Hamid mengungkapkan, layanan RS di daerah memang masih bermasalah. Dari persoalan SDM, sarana prasarana, dan infrastruktur suprastruktur selalu menjadi masalah RS daerah. Dia

menyaksikan bagaimana pasien ditampung berjejer di ruang ICU, karena keterbatasan kamar dengan pasien yang membludak. “Itu membuat pasien tidak nyaman. Kasihan melihat rakyat kecil yang tak terlayani dengan baik,” kata wakil rakyat dari dapil Jateng IV ini.

Kelak, pada 2019 semua warga Indonesia sudah mendapat layanan BPJS Kesehatan. Untuk itu, pemerintah dihimbau Hamid untuk berbenah dari sekarang, memperbaiki layanan dan memperkuat SDM kesehatan di setiap RS dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemenkes, lanjut Hamid, juga harus terus menggelorakan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selain membangun RS, mentalitas SDM kesehatan juga perlu segera dibenahi sehingga semuanya memiliki semangat mengabdikan dan melayani rakyat kecil yang selalu mendambakan layanan kesehatan terbaik. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.



Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro

Panja Keselamatan Penerbangan Komisi V Tinjau Bandara Hang Nadim, Batam

Pantia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI, ke Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (1/4). Kunjungan ini dalam rangka melihat kondisi Bandara Hang Nadim, yang disana ada sarana dan prasarana perawatan pesawat maskapai Lion Air.

“Ingin melihat peralatan yang

memenuhi standar dalam konteks keselamatan dan penerbangan,” kata Anggota Komisi V Fauzih Amro, sebelum menuju Kota Batam.

Menurut Fauzih, Komisi V ingin membuat rekomendasi yang jelas terkait kenyamanan, keselamatan, dan keamanan penerbangan. Ketiga kategori tersebut penting dibuat secara



komprehensif sehingga dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan penerbangan.

Komisi akan melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sebuah pesawat dapat dikatakan layak terbang, baik secara kondisi, perawatan, maupun SDM maskapai penerbangan. "Kita akan melihat perawatan pesawat, termasuk akan berbicara dengan pilot dan pramugari pesawat," katanya.

Harapannya tidak terjadi penundaan jadwal (*delay*) penerbangan Lion Air dan kasus kecelakaan pesawat Air Asia tidak terjadi lagi. Dan untuk otoritas bandara mempunyai SOP dalam menangani krisis dan *delay*. Ini penting sehingga peristiwa *delay* yang terakhir



terjadi pada maskapai lion air selama 4 hari 4 malam itu tidak terjadi lagi.

"Diharapkan ada SOP penanganan krisis, pihak otoritas bandara ada pegangan yang baku dan berjasama

dengan maskapai. Jangan sampai ketika *delay*, pegawai maskapai lari dari tanggung jawab," ungkap politisi Partai Hanura ini.

Tim Panja dalam acara ini dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis (F-Gerindra), di Bandara Hang Nadim mengadakan acara mendengar Ekspose System Managemen, SOP dan Evaluasi keselamatan, keamanan dan kualitas penerbangan. Selanjutnya, meninjau fasilitas pelayanan bandara.

Obyek peninjauan yaitu BP Batam, Lion Maintenance Facility, Perum LPPNPI/Airnav, BMKG, Basarnas, Briefing Office

Maskapai, Balai Kesehatan Bandara, Rescue Bandara, dan Ground Handling. (As) foto : rizka/parle/hr.

Dewan Janji UU Jasa Konstruksi Bersih Kepentingan Politik

Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamajido berjanji dan berusaha semaksimal mungkin agar dalam revisi UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bersih dari berbagai kepentingan politik dalam pertenderan sebagaimana selama ini dikeluhkan masyarakat. Pasalnya terbukti banyaknya bangunan, gedung sekolah, jembatan yang roboh dan merugikan negara.

"Pada prinsipnya UU konstruksi itu meliputi tiga hal; yaitu kemandirian, independensi dan profesionalisme. Kita berharap putra-putri Indonesia bangkit menjadi kontraktor yang hebat agar tidak dikuasai oleh asing. Yang terpenting lagi tidak berbau dengan politik dan pemerintah harus ikut bertanggungjawab," tegas Rendy Lamajido dalam forum legislasi 'Revisi UU Jasa Konstruksi' bersama anggota Komisi V DPR RI FPKB, Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Ia yakin jika ke depan dengan UU Konstruksi ini tak lagi bisa bermain-main dengan politik, karena ada lembaga arbitrase, akreditasi, lembaga pengawas, hanya penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga setiap tahapan jasa konstruksi akan terkontrol dengan baik. "LPJKN akan mengon-

trol setiap tahapan jasa konstruksi, sehingga akan mampu melakukan pengawasan secara cermat dan bertanggungjawab," ujar Rendy yang juga Ketua Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) ini.



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamajido

UU Nomor 18 tahun 1999 tersebut mulai berlaku sejak tahun 2000, ujarnya, namun yang dominan hanya independensinya, sehingga pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal. "UU ini menganggangi pemerintah, sehingga terjadi kekisruhan dalam sertifikasi akibat ada

permainan uang dan perusahaan yang keluar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka, setelah 15 tahun ini kita mendorong UU ini lebih baik dan lebih ketat lagi," ungkap Rendy.

Sementara Jazilul Fawaid menyoroti banyaknya bangunan dan gedung yang roboh selama ini, akibat tidak mempertimbangkan standar keselamatan. Oleh karenanya, tegas Jazilul, UU Jasa Konstruksi ini harus dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas, agar kontraktor dalam menjalankan pekerjaannya benar-benar profesional dan independen dengan mempertimbangkan berbagai aspek; baik ketahanan bangunan, keselamatan, *design* yang sesuai dengan budaya bangsa, dan asing harus bekerjasama dengan Indonesia.

"Kita hampir setiap hari menyaksikan gedung dan jembatan yang roboh karena tidak ada sanksi hukum yang tegas terhadap kontraktor bangunan. Padahal, banyak menelan korban jiwa. Untuk itu, ke depan harus ada sanksi yang tegas terhadap perusahaan jasa konstruksi yang tidak profesional dan tidak pula bertanggungjawab," tandasnya. (sc) foto : rizka/parle/hr



Suasana RDPU Komisi I DPR RI dengan Pemred dan Pengelola Situs yang diblokir Kemenkominfo, Rabu (01/04). Foto: Andri/Parle/HR



Komisi IV DPR RI Raker dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait masalah illegal fishing dan Permen Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net), Rabu (01/04). Foto: Rizka/Parle/HR



Komisi IX DPR RI Raker dengan Menkes, Kepala Badan POM, dan Dirut BPJS Kesehatan membahas Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Senin (30/03). Foto: Naefurodji/Parle/HR